

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Informasi Akuntansi

1. Pengertian

Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Pengertian tersebut mencerminkan adanya beberapa bagian dan hubungan antarbagian, ini menunjukkan kompleksitas dari sistem yang meliputi kerja sama antara bagian yang interdependen satu sama lain. Selain itu, dapat dilihat bahwa sistem berusaha mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ini menyebabkan timbulnya dinamika, perubahan yang terus-menerus perlu dikembangkan dan dikendalikan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sistem sebagai gugus dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara teratur dalam rangka mencapai tujuan atau subtujuan.²³

Menurut Kenneth C. Laudon, informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam sebuah formulir bentuk yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk manusia. (Data adalah deretan fakta-fakta yang menggambarkan kejadian yang

²³Marimin, *et al.*, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 1.

terjadi dalam organisasi lingkungan fisik sebelum diorganisasi dan diatur ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan orang).²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) itu adalah suatu subsistem dari SIM yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh rutin atas transaksi akuntansi.²⁵

SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. SIA bisa berupa kertas dan alat tulis (manual) maupun terkomputerisasi penuh (serba otomatis) atau kondisi di antara keduanya (gabungan manual dan komputerisasi). Teknologi hanyalah alat untuk menyusun, memelihara, ataupun menyempurnakan sistem.²⁶

2. Proses Bisnis dan Sistem Informasi Akuntansi

Proses bisnis (*business process*) adalah urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu bisnis untuk memperoleh, menghasilkan, serta menjual barang dan jasa. Para akuntan dan yang lain memiliki kepentingan dalam pemodelan proses bisnis. Beberapa model dari proses bisnis telah dikembangkan. Para akuntan memanfaatkan proses bisnis perusahaan dalam bentuk siklus transaksi. Siklus transaksi (*transaction cycles*) mengelompokkan

²⁴Jimmy L. Gaol, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 8.

²⁵Dasaratha V. Rama dan Frederick L. Jones, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 6.

²⁶Samiaji Sarosa, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 13.

kejadian-kejadian terkait yang pada umumnya terjadi dalam suatu urutan tertentu. Kejadian (*event*) adalah aktivitas yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Sebagai contoh, seorang pelanggan melakukan pemesanan, barang dikirimkan, dan laporan penjualan dicetak. Setiap siklus transaksi melibatkan beberapa kejadian. Terdapat tiga siklus transaksi utama:

- a. Siklus pemerolehan/pembelian (*acquisition/purchasing cycle*) adalah proses pembelian dan pembayaran untuk barang-barang atau jasa.
- b. Siklus konversi (*conversion cycle*) adalah proses mengubah sumber daya yang diperoleh menjadi barang-barang dan jasa.
- c. Siklus pendapatan (*revenue cycle*) adalah proses menyediakan barang atau jasa untuk para pelanggan dan menagih uangnya.²⁷

3. Komponen dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi²⁸

Menurut Romney dan Steinhart (2006) sistem informasi akuntansi terdiri empat komponen:

- a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.

²⁷Dasaratha V. Rama dan Frederick L. Jones, *Sistem Informasi*, 3-4.

²⁸Marshall B. Romney dan Paul John Steinhart, *Accounting Information System: Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 3.

- b. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
- c. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
- d. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Keempat komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi penting dalam organisasi, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.
- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.

4. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi²⁹

a. Membuat laporan eksternal

Perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan laporan-laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi dari para investor, kreditor, dinas pajak, badan-badan pemerintah, dan yang lain. Laporan-laporan ini mencakup laporan keuangan, SPT (Surat Pemberitahuan) pajak, dan laporan yang diperlukan oleh badan-badan pemerintah yang mengatur perusahaan dalam industri perbankan dan utilitas. Laporan jenis ini mengikuti suatu struktur yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi seperti Financial Accounting Standards Board—FASB (Dewan Standar Akuntansi Keuangan AS), Securities and Exchange Commission—SEC (Badan Pengawas Pasar Modal AS), Internal Revenue Service—IRS (Dinas Pajak AS), dan regulator lainnya. Oleh karena bentuk dan isi yang diterapkan untuk laporan-laporan ini secara relatif tetap dan sama untuk banyak organisasi, para pemasok peranti lunak (*software*) dapat menyediakan peranti lunak akuntansi yang mengotomatisasikan sebagian besar proses pelaporan. Sebagai hasilnya, setelah informasi yang diperlukan dicatat, laporan-laporan eksternal dapat dihasilkan dengan jauh lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan di masa lalu.

²⁹Dasaratha V. Rama dan Frederick L. Jones, *Sistem Informasi*, 7-8.

b. Mendukung aktivitas rutin

Para manajer memerlukan satu sistem informasi akuntansi untuk menangani aktivitas operasi rutin sepanjang siklus operasi perusahaan itu. Contohnya antara lain menerima pesanan pelanggan, mengirimkan barang dan jasa, membuat faktur penagihan pelanggan, dan menagih kas ke pelanggan. Sistem komputer mahir menangani transaksi-transaksi yang berulang, dan banyak paket peranti lunak akuntansi yang mendukung fungsi-fungsi yang rutin ini. Teknologi lain, seperti *scanner* untuk memindai kode produk, meningkatkan efisiensi dari proses bisnis.

c. Mendukung pengambilan keputusan

Informasi juga diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tidak rutin pada semua tingkat dari suatu organisasi. Contohnya antara lain mengetahui produk-produk yang penjualannya bagus dan pelanggan mana yang paling banyak melakukan pembelian. Informasi ini sangat penting untuk merencanakan produk baru, memutuskan produk-produk apa yang harus ada di persediaan, dan memasarkan produk kepada para pelanggan. Permintaan informasi non standar memerlukan permintaan informasi (*query*) yang fleksibel akan data dalam suatu basis data (basis data).

d. Perencanaan dan pengendalian

Suatu sistem informasi juga diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian. Informasi mengenai anggaran dan biaya standar disimpan

oleh sistem informasi dan laporan dirancang untuk membandingkan angka anggaran dengan jumlah aktual. Menggunakan pemindai untuk mencatat barang yang dibeli dan dijual mengakibatkan terkumpulnya jumlah informasi yang sangat banyak dengan biaya yang rendah, memungkinkan pengguna untuk merencanakan dan mengendalikan dengan lebih terperinci. Sebagai contoh, analisis pendapatan dan beban bisa dilakukan di tingkatan produk secara individu. Data historis dapat diambil dari basis data dan digunakan dalam lembar kerja (*spreadsheet*) atau program lain untuk meramalkan pertumbuhan dan arus kas. Para perencana dapat menggunakan *data mining* (penggalian data dengan menggunakan peranti lunak untuk mencari penyimpanan yang besar dari data historis) untuk mengungkapkan tren jangka panjang dan pola hubungan data.

e. Menerapkan pengendalian internal

Pengendalian internal (*internal control*) mencakup kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan. Dimungkinkan untuk membangun pengendalian ke dalam suatu sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi untuk membantu mencapai tujuan ini. Sebagai contoh, satu sistem informasi dapat menggunakan kata sandi (*password*) untuk mencegah individu lain memiliki akses ke format data entri dan laporan yang tidak diperlukan untuk

menjalankan pekerjaan mereka. Selain itu, format data entri dapat dirancang untuk secara otomatis memeriksa *error* dan mencegah jenis tertentu dari data entri yang akan melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat.

5. Akuntansi dan Teknologi Informasi³⁰

Model akuntansi memungkinkan dua bentuk pemrosesan, yaitu pemrosesan transaksi dan pemrosesan informasi. Pemrosesan transaksi menyajikan informasi catatan prestasi dan informasi pengarah perhatian, sedangkan pemrosesan informasi dipusatkan pada informasi untuk pengambilan keputusan.

a. Pemrosesan akuntansi

Transaksi merupakan peristiwa-peristiwa ekonomi yang dapat diukur dalam satuan keuangan yang mempengaruhi harta dan ekuitas perusahaan dan yang tercermin dalam rekening serta ikhtisar keuangan perusahaan. Transaksi ekstern terjadi akibat pertukaran antara perusahaan dengan pihak-pihak luar. Transaksi intern terjadi akibat operasi intern perusahaan. Walaupun tiap-tiap perusahaan menjumpai sangat banyak transaksi, beberapa jenis pokok transaksi lazim dialami kebanyakan perusahaan.

³⁰Tata Sutabri, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 14-15.

b. Pemrosesan informasi

Pemrosesan ini melibatkan penggunaan model pengambilan keputusan, seperti model-model akuntansi manajerial. Beberapa dari masukan yang dibutuhkan diperoleh sebagai hasil samping pemrosesan transaksi. Tetapi banyak dari masukan yang harus diproses dari sumber-sumber lain, baik intern maupun ekstern.

B. Pengendalian Internal

1. Pengendalian Internal dan Peran Akuntan³¹

Pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemahaman yang baik mengenai pengendalian internal penting bagi akuntan yang berperan sebagai manajer, pengguna, perancang, dan evaluator sistem akuntansi.

- a. Tanggung jawab manajer atas pengendalian internal telah dibuat secara eksplisit di Undang-Undang Sarbanes-Oxley Tahun 2002 dan Standar No. 2

³¹Dasaratha V. Rama dan Frederick L. Jones, *Sistem Informasi*, 132-133.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).³² Standar No. 2 mengharuskan manajemen untuk membuat sebuah pertanyaan yang menjelaskan dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan. Laporan tahunan perusahaan publik saat ini harus mencakup (1) pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, (2) pernyataan yang mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi pengendalian internal, (3) penilaian atas pengendalian internal dan pengungkapan adanya kekurangan material, dan (4) pernyataan bahwa kantor akuntan publik telah menerbitkan laporan attestasi atas penilaian manajemen terhadap pengendalian internal.

- b. Pengguna juga harus memahami pengendalian internal perusahaan sehingga dapat ditetapkan dengan tepat. Sebagai contoh, kebijakan manajemen mungkin mengharuskan bahwa detail faktur harus diverifikasi terhadap slip pengepakan dan pesanan pembelian (PO). Pengendalian seperti itu dikatakan efektif hanya jika orang yang bertanggung jawab atas pencatatan faktur memahami dan melakukan verifikasi ini.

³²Undang-Undang Sarbanes-Oxley dihasilkan dalam pembentukan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), yang diberdayakan untuk mengajukan standar audit perusahaan publik. Security and Exchange Commission (SEC) harus menyetujui setiap standar agar dapat dilaksanakan. PCAOB menyusun Standar Audit No. 2, "Audit atas Pengendalian Internal terhadap Pelaporan Keuangan yang Dilakukan dalam Hubungannya dengan Audit Laporan Keuangan." Standar ini disetujui oleh SEC dalam Rilis No. 34-49884, 17 Juni 2004.

- c. Akuntan juga memiliki peran penting sebagai perancang prosedur pengendalian internal yang mendorong ketaatan terhadap peraturan dan sasaran perusahaan. Akuntan harus menilai risiko atas tidak tercapainya sasaran perusahaan dan sasaran pengendalian internal serta memilih atau merencanakan pengendalian internal yang dapat mengurangi risiko.
- d. Dalam perannya sebagai *evaluator*, auditor internal dan auditor eksternal harus memahami sistem pengendalian internal. Auditor internal memainkan peran penting dalam mengembangkan laporan manajemen yang menilai pengendalian internal, saat ini diharuskan oleh Standar PCAOB No. 2. Auditor eksternal perlu memahami pengendalian internal sehingga dapat menyusun atestasi atas pernyataan manajemen mengenai pengendalian internal sebagaimana diharuskan oleh standar tersebut. Tentu saja, auditor eksternal perlu memahami pengendalian internal sehingga mereka dapat melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Standar audit yang berlaku umum memiliki banyak ketentuan bahwa auditor harus memperoleh pemahaman memadai mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit.

2. Konsep, Tujuan dan Unsur Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal (*internal control system*) terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya:³³

- a. Menjaga aktiva perusahaan.
- b. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan.
- d. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Tujuan utama pengendalian internal adalah meyakinkan:³⁴

- a. Keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi;
- b. Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan;
- c. Perlindungan terhadap harta organisasi;
- d. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien;
- e. Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

³³James A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 181.

³⁴Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 44.

Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan lima unsur pengendalian internal (*elements of internal control*) untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian atau penetapan risiko
- c. Prosedur pengendalian
- d. Pemantauan (*monitoring*)
- e. Informasi dan komunikasi

C. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

1. Pengertian

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakah* ‘keberkahan’, *al-namā* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *aṭ-ṭahāratu* ‘kesucian’ dan *aṣ-ṣalaḥu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.³⁶ Golongan tertentu itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat *At-Taubah* ayat 60 berikut ini:

³⁵Warren Reeve Fess, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 209.

³⁶Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 7.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁷

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.³⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *An-Nūr* ayat 56 berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

³⁷Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: *Mujamma' Al-Malik Fahd Li Aṭ-Ṭibā'at Al-Muṣḥaf Al-Syarīf*, 1418 H), 288.

³⁸Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 390.

Artinya: *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*³⁹

Infak merupakan harta (materiil) yang disunahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Sedangkan sedekah adalah harta non materiil yang disunahkan untuk dikerjakan, contoh: senyum, menyingkirkan batu/paku di tengah jalan, dan lain sebagainya. Pengertian infak sebenarnya sama dengan pengertian sedekah, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materi. Secara akuntansi, infak masih mungkin untuk dihitung sedangkan sedekah tidak mudah melakukan kalkulasi secara tepat karena merupakan pemberian harta non materiil.⁴⁰

Infak merupakan anjuran Allah untuk dikeluarkan kepada orang-orang fakir, seperti dalil Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 273 di bawah ini:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ

³⁹Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan*, 554.

⁴⁰Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, 392.

Artinya: *(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*⁴¹

2. Lembaga Pengelola ZIS

Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Dalam perkembangannya LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan BAZ bahkan bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid, yayasan pengelola dana ZIS, maupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana ZIS dari direksi maupun karyawan.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan

⁴¹Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan*, 68.

motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya:

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada Pasal 22 SK Menteri Agama RI tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin dari pemerintah maka laporan keuangan LAZ untuk dua tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Selanjutnya, laporan keuangan LAZ tingkat pusat maupun provinsi harus bersedia diaudit oleh Akuntan Publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.

Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama RI tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk OPZ. Sampai akhirnya pada tahun 2005, Forum Zakat

berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ).⁴²

3. Akuntansi ZIS

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.⁴³ Allah telah menjelaskan pentingnya menulis dalam hal muamalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 282 berikut:

..... وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: *hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,*⁴⁴

Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat *māl* dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk

⁴²Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah.....*, 389.

⁴³Jusuf Al haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, jilid I, (Yogyakarta: YKPN, 2001), 5.

⁴⁴ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan*, 70.

menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.⁴⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*), pengawasan, sarana untuk pengambilan keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syariah (mengeluarkan opini syariah). Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.⁴⁶

⁴⁵M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 28.

⁴⁶Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 143.

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.⁴⁷

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur.⁴⁸ Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu

⁴⁷Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), 297.

⁴⁸*Ibid.*, 322.

tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, *niṣab* (batas jumlah). Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infak dan sedekah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.⁴⁹

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut.⁵⁰

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah neraca, (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁵¹ Neraca dan laporan

⁴⁹Ikatan Akuntansi Indonesia, "PSAK No. 109", Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

⁵⁰Dahlia Heryani, "Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2005.

⁵¹Ikatan Akuntansi Indonesia, "PSAK No. 109", Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS.

4. PSAK No. 109⁵²

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun *Exposure Draft* (ED) PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan ZIS pada Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana ZIS baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah OPZ yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat.

Pada Rancangan ED PSAK No. 109 yang pernah disusun oleh IAI sebagai satu tahap yang dilalui menuju penyusunan PSAK terdapat usulan bahwa ruang lingkup pemberlakuan PSAK tentang ZIS adalah entitas pembayar zakat, entitas pengelola (amil), dan entitas penerima zakat. Namun

⁵²Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah.....*, 394-395.

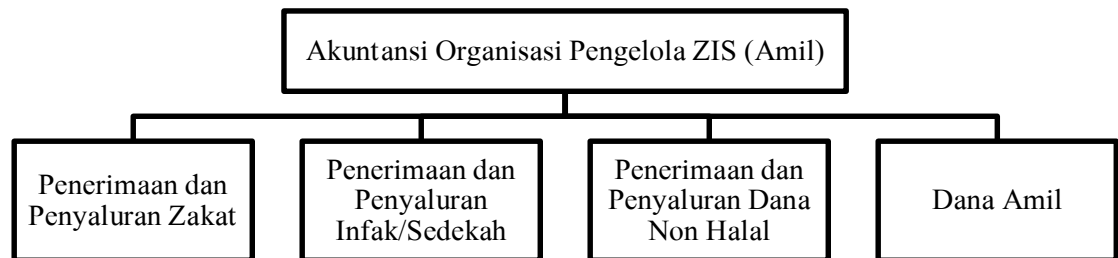
demikian, terdapat masalah manakala entitas pembayar zakat diusulkan sebagai salah satu bagian yang mengikuti PSAK ini karena hakekatnya perusahaan (entitas) tidak wajib membayar zakat. Subyek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu saja sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak untuk mengeluarkan fatwa yang intinya perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti yang pernah diusulkan oleh IAI. Akhirnya ED PSAK No. 109 tentang Akuntansi ZIS diusulkan hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat saja sedangkan entitas pembayar dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK No. 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah.

ED PSAK No. 109 dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008 dan disosialisasikan ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan demi perbaikan PSAK tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan ED PSAK No. 109 yang kemudian disimulasikan sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran implementasi dan dampak pemberlakuan PSAK ini terhadap penyajian dan pengungkapannya.

Gambar 1

Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola ZIS



Sumber: Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 395.

Gambar di atas menjelaskan tentang alur pembahasan akuntansi bagi Amil yang diterapkan sesuai dengan ED PSAK No. 109 tentang Akuntansi ZIS. Dana-dana yang dikelola oleh OPZIS adalah dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan dana amil sehingga menurut ED PSAK ini keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya. Selengkapnya mengenai ED PSAK No. 109 penulis lampirkan di halaman belakang.

Dalam website resmi Forum Zakat (FOZ) Ahmad Juwaini, Ketua Umum Forum Zakat Nasional menulis sebagai berikut:

Penantian panjang itu akhirnya berakhir. Setelah hampir lima tahun pergumulan mengupayakan berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), kini

pemberlakuan itu telah menjadi nyata. Dimulai dengan pembahasan tentang pedoman akuntansi dan keuangan OPZ, yang kemudian berubah menjadi buku yang diterbitkan Forum Zakat (FOZ) pada tahun 2005.

Selanjutnya terjadi pembahasan tentang konsep PSAK Zakat yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hasil pembahasan IAI ini kemudian diterbitkan menjadi Exposure Draft PSAK No. 109 pada tahun 2008. Exposure Draft PSAK No. 109 ini kemudian terkendala oleh karena masih adanya beberapa permasalahan yang harus mendapatkan opini syariah (baca ; fatwa) dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Beberapa permasalahan dalam PSAK No. 109 yang masih harus mendapatkan opini syariah dari DSN MUI tersebut adalah : 1) Biaya iklan / promosi yang dilakukan oleh OPZ 2) Penyaluran zakat yang tidak langsung diterima mustahik 3) Penyaluran dalam bentuk aset kelolaan oleh amil 4) Penyaluran zakat kepada yayasan sosial 5) Penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman atau dana bergulir 6) Investasi dana zakat 7) penyajian laporan dana non halal dan 8) Pengaturan zakat perusahaan. Akhirnya pada tahun 2011 ini opini syariah itu telah dikeluarkan. Bulan Ramadhan lalu telah menjadi angin segar, karena PSAK No. 109 telah diselesaikan. Dalam bulan September atau Oktober 2011 ini, buku PSAK No. 109 akan terbit dan dinikmati oleh kita semua. Ini artinya bahwa PSAK No. 109 telah resmi berlaku.⁵³

⁵³Ahmad Juwaini, "Kini PSAK No. 109 Berlaku", dalam <http://www.forumzakat.net/index.php?act=paparan&id=14> (3 Oktober 2011)